



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2024**

**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JOMBANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Jombang sebagai informasi capaian kinerja atas pelaksanaan program kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan, baik keberhasilan maupun kendala pelaksanaan program kegiatan yang diuraikan secara transparan dalam Laporan Kinerja ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus menyusun Laporan Kinerja yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Adapun penyusunan laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2024 ini, kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, sehingga saran atau masukan sangat diperlukan guna penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja di masa yang akan datang.

Jombang, 31 Desember 2024



KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG

AGUNG HARIADI, ST., MM.

Pembina

NIP.19701126 200212 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Isu-Isu Strategis.....	11
1.5 Sistematika Laporan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1. Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman	13
2.2. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	17
2.3 Cascading Kinerja	19
2.4 Proses Bisnis.....	19
2.5 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2 Realisasi Anggaran.....	32
3.3 Analisis Penyebab Peningkatan dan Penurunan Kinerja	39
3.4 Pengarusutamaan Gender (PUG).....	40
BAB IV PENUTUP.....	42
4.1. Permasalahan	42
4.2 Rekomendasi.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman	3
Tabel 2.1.2 Target Renstra 2024-2026 Dinas Perumahan dan Permukiman.....	14
Tabel 2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi	15
Tabel 2.2.1 Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2024.....	17
Tabel 2.2.2 Perubahan Target Program Tahun 2024	18
Tabel 2.2.3 Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024.....	18
Tabel 2.2.4 Perjanjian Kinerja Program Tahun 2024	19
Tabel 3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024	24
Tabel 3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan 2 tahun terakhir.....	27
Tabel 3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah	30
Tabel 3.1.4 Kinerja Kementrian PUPR 2024.....	30
Tabel 3.1.5.1 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tahun 2022-2024.....	31
Tabel 3.1.5.2 Target Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024	31
Tabel 3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan anggaran	32
Tabel 3.2.2.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Program	33
Tabel 3.2.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis	34
Tabel 3.2.2.3 Analisis Jabatan Pegawai tahun 2024	35
Tabel 3.2.2.4 Efisiensi Sarana dan Prasarana.....	36
Tabel 3.2.2.5 Perbandingan Sarpras Kantor dengan Anjab dan Capaian Kinerja	39
Tabel 3.4.1 Analisis Situasi PUG Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023	40

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2024, dari capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, serta realisasi anggaran yang menginformasikan keberhasilan, kendala, evaluasi, rekomendasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang. Dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di perumahan dan kawasan permukiman;

Indikator pencapaian Kinerja Tahun 2024 adalah dengan membandingkan target dengan realisasi pelaksanaan yang dituangkan dalam persentase (%) capaian kinerja. Jika dibandingkan dengan indikator kinerja tahun sebelumnya, capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2024 lebih meningkat dan berorientasi pada hasil.

Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang tahun 2024 meliputi:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
4. Program Kawasan Permukiman;
5. Program Pengembangan Perumahan;
6. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
7. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi. Capaian Indikator Kinerja yang masih dibawah target terus dilakukan evaluasi dan *action plan* yang relevan. Untuk itu, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang menjadi organisasi yang berkinerja tinggi.

Jombang, 31 Desember 2024



KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG

AGUNG HARIADI, ST., MM.

Pembina

NIP.19701126 200212 1 006

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang mengamanatkan Pemerintah Daerah dan setiap Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan SAKIP. SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP bertujuan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Salah satu komponen dari SAKIP adalah pelaporan kinerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja disusun untuk memberikan informasi capaian kinerja atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai. Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya. Selain itu, laporan kinerja juga berfungsi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pembahasan laporan kinerja ini meliputi seluruh lingkup pekerjaan unit organisasi yang mendukung pencapaian sasaran strategis dan program Dinas Perumahan dan Permukiman. Lingkup pekerjaan dimaksud meliputi bidang pengembangan kawasan permukiman, bidang perumahan, serta bidang prasarana, sarana dan utilitas umum.

Secara umum, laporan kinerja menjelaskan tingkat pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Laporan kinerja ini juga menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dan mengulas pemanfaatan kinerja sebagai acuan dalam penyesuaian kegiatan pencapaian kinerja pada tahun berjalan dan untuk periode berikutnya.

1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman

Peraturan Bupati Jombang No. 81 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang.

Kedudukan

1. Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Dinas Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

3. Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di perumahan dan kawasan permukiman;

1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang terdiri dari:

- a. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bidang Perumahan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, membawahi
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Unit Pelaksana Teknis
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan susunan organisasi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang, susunan organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang sebagaimana bagan dibawah ini:

Tabel 1.3 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	JABATAN	TUGAS
1	KEPALA DINAS	Membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Jombang di bidang Perumahan dan Permukiman.
		FUNGSI
		1 Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman
		2 Melaksanakan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman
		3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman
		4 Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Permukiman
		5 Penyelenggaraan fungsi–fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman
		6 Pembinaan penyelenggaraan fungsi–fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman
7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati		
2	SEKRETARIS	Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Permukiman dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.
		FUNGSI
		1 Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum

NO	JABATAN	TUGAS	
		2	Pengelolaan administrasi kepegawaian
		3	Pengelolaan administrasi keuangan
		4	Pengelolaan administrasi perlengkapan
		5	Pengelolaan administrasi aset
		6	Pengelolaan urusan rumah tangga
		7	Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
		8	Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang
		9	Pengelolaan kearsipan
		10	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
		11	Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil Negara
		12	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
2	a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	1	Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional sesuai dengan kebijakan nasional dan propinsi
		2	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas – tugas organisasi dan tata laksana aparatur
		3	Menyelenggarakan kegiatan–kegiatan protoler, pertemuan dan rapat–rapat penerimaan tamu
		4	Menyelenggarakan kegiatan urusan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan
		5	Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan ketatausahaan serta perlengkapan kantor
		6	Melaksanakan pengelolaan aset
		7	Melaksanakan urusan rumah tangga , surat menyurat, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan
		8	Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor
		9	Mengatur dan mengelola barang inventaris dan aset kantor
		10	Melaksanakan penatanausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi / pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran
		11	Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, perpindahan pegawai, gaji pegawai dan pembayaran hak – hak keuangan lainnya
		12	Menyusun, melaksanakan dan bertanggung jawabkan anggaran
		13	Menyusun, melaksanakan dan bertanggung jawabkan anggaran
		14	Melaksanakan pembinaan dan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai
		15	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
2	b. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Penyusunan Program dan Evaluasi	1	Menghimpun, mengelola, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran
		2	Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan

NO	JABATAN	TUGAS	
		3	Melaksanakan koordinasi perencanaan program dan kegiatan anggaran
		4	Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penelitian pelaksanaan program dan anggaran
		5	Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman
		6	Penyusunan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
		7	Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
		8	Mengelola mengembangkkan data dan system informasi
		9	Melaksanakan supervise, pelaporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan
		10	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
3	BIDANG PERUMAHAN		Melaksanakan sebagian tugas perumahan dan permukiman di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan
			FUNGSI
		1	Perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan
		2	Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan
		3	Penyusunan dan pelaksanaan program kerja di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan
		4	Pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan
		5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan
		6	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
3	a. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Pendataan Perencanaan, Penyediaan dan Pembiayaan Rumah Umum	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum
		3	Menyusun petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum

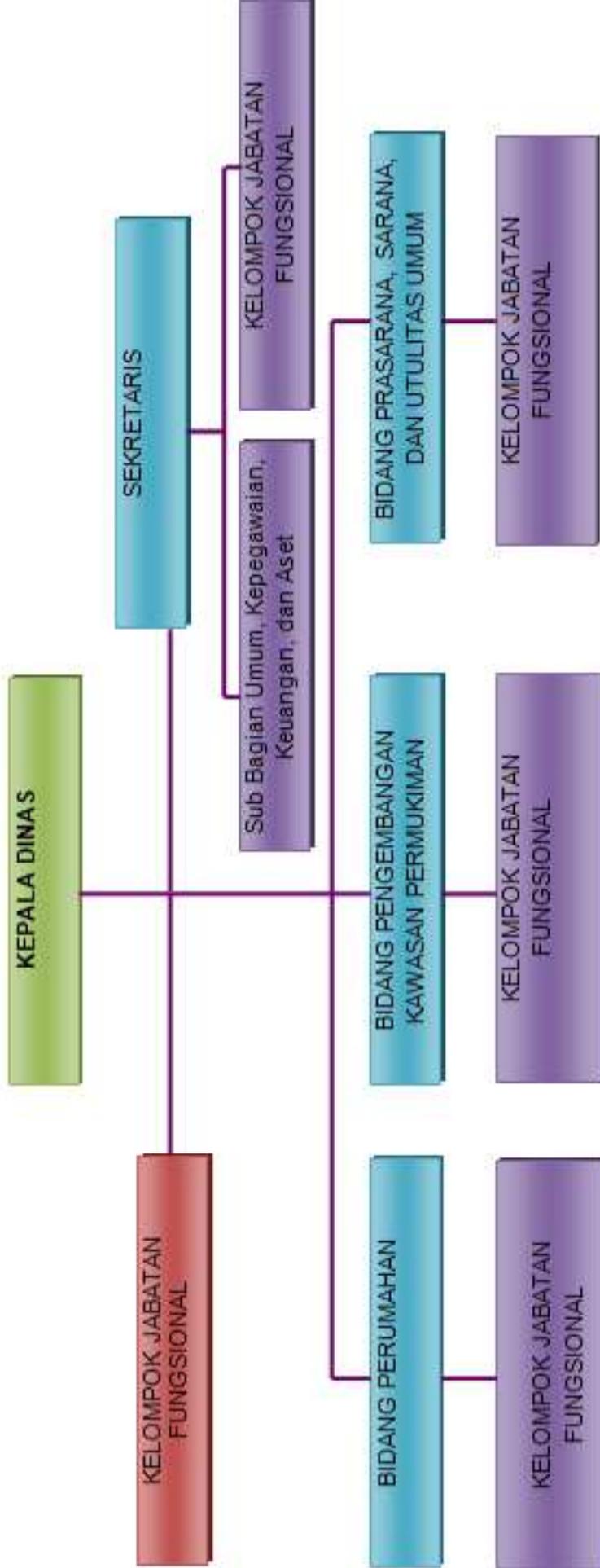
NO	JABATAN	TUGAS	
		6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan
3	b. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Pendataan Perencanaan, Penyediaan dan Pembiayaan Rumah Swadaya	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah swadaya
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah swada
		3	Menyusun petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah swadaya
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah swadaya
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah swadaya
		6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah swadaya
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan
3	c. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi perumahan umum dan swadaya
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan di bidang pemantauan dan evaluasi perumahan umum dan swadaya
		3	Menyusun petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemantauan umum dan swadaya
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemantauan dan evaluasi perumahan umum dan swadaya
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait di bidang pemantauan dan evaluasi perumahan umum dan swadaya
		6	Melaksanakan pelaporan kegiatan di bidang pemantauan dan evaluasi perumahan umum dan swadaya
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan
4	BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Permukiman di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis	
		FUNGSI	
		1	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis
		2	Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis
		3	Penyusunan dan pelaksanaan program kerja di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis

NO	JABATAN	TUGAS	
		4	Pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis
		5	Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis
		6	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
4	a. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Kawasan Perkotaan	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan
		3	Penyusunan petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan
		6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
4	b. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Kawasan Pedesaan	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan
		3	Penyusunan petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait di bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan
		6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
4	c. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Kawasan Khusus dan Kawasan Strategis	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan khusus dan kawasan strategis
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan kawasan khusus dan kawasan strategis
		3	Penyusunan petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kawasan khusus dan kawasan strategis
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan kawasan khusus dan kawasan strategis

NO	JABATAN	TUGAS	
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait di bidang pengembangan kawasan khusus dan kawasan strategis
		6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan khusus dan kawasan strategis
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
5	BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM		Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Permukiman di bidang pengelolaan air bersih, air limbah domestic, dan drainase.
			FUNGSI
		1	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air bersih, air limbah domestic, dan drainase
		2	Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air bersih, air limbah domestic, dan drainase
		3	Penyusunan dan pelaksanaan program kerja di bidang pengelolaan air bersih, air limbah domestik, dan drainase
		4	Pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan air bersih, air limbah domestic, dan drainase
		5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan air bersih, air limbah domestic, dan drainase
		6	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
5	a. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Air Bersih	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan air bersih
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan air bersih;
		3	Menyusun petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang pengelolaan air bersih
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan air bersih
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait di bidang pengelolaan air bersih; Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan air bersih
		6	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
5	b. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Air Limbah Domestik	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan air limbah domestic
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan air limbah domestic
		3	Menyusun petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang pengelolaan air limbah domestic
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan air limbah domestic
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait di bidang pengelolaan air limbah domestic

NO	JABATAN	TUGAS	
		6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan air limbah domestic
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
5	c. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Drainase	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan drainase lingkungan
		2	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan drainase lingkungan
		3	Menyusun petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang pengelolaan drainase lingkungan
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan drainase lingkungan
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait di bidang pengelolaan drainase lingkungan
		6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan drainase lingkungan
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG



1.4 Isu-Isu Strategis

1.4.1 Permasalahan di Bidang Perumahan

1. Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan yang kurang memenuhi kebutuhan operasional dinas;
2. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan belum disertai oleh tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur;
3. Tingginya rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah 5.406 RT/KK (1,35%);
4. Tidak meratanya sebaran kondisi RTLH di tiap kecamatan, sehingga menimbulkan kesenjangan dan membutuhkan perencanaan penanganan yang lebih mengedepankan skala prioritas;
5. Banyaknya perumahan dan kawasan perumahan yang belum tertata Prasarana dan Sarana Utilitasnya yang disebabkan masih dalam tanggung jawab pengembang;
6. Banyak perumahan yang aset prasarana umumnya belum diserahkan ke Pemerintah Daerah, sehingga belum bisa tertangani prasarana umumnya;
7. Kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat penghuni perumahan untuk mendapatkan perumahan dan kawasan perumahan dengan PSU yang layak dan asri bagi hunian masyarakat;
8. Evaluasi pada akhir pembangunan terhadap kondisi dan manfaat infrastruktur yang terbangun.

1.4.2 Permasalahan di Bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum

1. Tingginya rumah tangga dengan sanitasi belum layak di Kabupaten Jombang sebanyak 53.437 RT/KK (13,30%) membutuhkan strategi penanganan yang mengedepankan skala prioritas, karena merupakan kebutuhan dasar sedangkan kemampuan cakupan penanganan sangat terbatas;
2. Updating data kesinambungan untuk pembangunan/pelayanan penyediaan sanitasi bisa proposional sesuai dengan prioritas;
3. Daerah rawan air bersih yang telah ditetapkan yaitu 8 kecamatan, 5 di Utara Brantas dan 3 di luar Utara Brantas yang membutuhkan penanganan yang berbeda satu sama lain. Misalkan, di Utara Brantas kondisi sumber air yang sangat terbatas untuk eksplorasi membutuhkan tenaga ahli geolistik khusus untuk menentukan serta banyaknya infrastruktur yang cenderung menutup resapan air seperti banyaknya bangunan dan jalan tidak menyediakan lahan resapan;
4. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penurunan kondisi alam yang terus meningkat, sedangkan kebutuhan air bersih juga semakin tinggi;
5. Semakin tinggi debit air yang masuk di drainase perkotaan, karena semakin berkurangnya lahan resapan perkotaan;

6. Semakin tinggi air hujan yang masuk di jaringan irigasi karena hutan yang semakin gundul dan resapan terus berkurang, menyebabkan jaringan irigasi tidak bisa menampung air hujan. Hal ini berdampak pada tingginya genangan perkotaan akibat air di drainase tidak bisa tertampung pada saluran irigasi;
7. Merubah pola pikir pembangunan drainase, serta masyarakat untuk dapat menyediakan resapan pada perencanaan drainase perkotaan dan masing-masing rumah tangga dengan desain yang menyesuaikan;
8. SID perencanaan perlu selalu *update* tiap tahun untuk menghindari perubahan kondisi penataan permukiman perkotaan;
9. Evaluasi pada akhir pembangunan terhadap kondisi dan manfaat infrastruktur yang terbangun.

1.4.3. Permasalahan di Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

1. Telah ditetapkan kawasan kumuh dengan Surat Keputusan Bupati No:188.4.45/ 318 /415.10.1.3/2020 Tahun 2020 dengan 9 kecamatan, 37 desa, 474.71 Ha merupakan tantangan bagi Dinas Perumahan dan Permukiman untuk menyelesaikan/tertangani hingga tahun 2028; ada sk baru
2. Pencegahan kawasan kumuh dengan pembangunan kawasan pedesaan, perkotaan dan kawasan khusus dengan penetapan infrastruktur yang tidak tumpang tindih dengan tupoksi OPD lain;
3. Pencegahan kawasan kumuh dengan pembangunan kawasan tidak akan berhasil jika tidak terkoneksi dengan program pembangunan penataan bangunan perkotaan sesuai dengan penetapan tata ruang pada pemangku kepentingan pada OPD lain;
4. Update data kawasan yang berkelanjutan agar pembangunan kawasan pencegahan kawasan kumuh tidak spasial;
5. Evaluasi pada akhir pembangunan terhadap kondisi dan manfaat infrastruktur yang terbangun.

1.5 Sistematika Laporan

Bab I Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi dan isu strategis yang sedang dihadapi Dinas Perumahan dan Permukiman.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menjelaskan visi, misi, arah kebijakan dan strategi, program dalam renstra dan perjanjian kinerja beserta perubahan anggaran yang terjadi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Analisis capaian kinerja, penyerapan anggaran serta efisiensi sumber daya. Sehingga laporan ini bisa digunakan untuk evaluasi dan perencanaan pelaksanaan tahun berikutnya.

Bab IV Penutup

Terdiri dari kesimpulan, permasalahan, dan rekomendasi untuk meningkatkan capaian tahun berikutnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman

2.1.1 Tujuan dan sasaran

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pejabat Bupati Kabupaten Jombang periode yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang 2024-2026, Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai salah satu OPD yang mendukung Bupati Jombang di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pengendalian, evaluasi, pembinaan dan pengawasan di bidang rumah umum, rumah swadaya, perumahan dan kawasan permukiman, serta penyediaan prasarana sarana utilitas umum pada tingkat kabupaten sesuai perundang-undangan dan mendukung tujuan dan sasaran Pejabat Bupati Kabupaten Jombang.

Tujuan IV :

Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) Sasaran, yaitu;

1. Meningkatnya PDRB sektor Unggulan dan Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Kunjungan Wisata;
3. Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pemerataan Pembangunan antar Wilayah;
4. Meningkatnya Keberdayaan Desa;
5. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Ekonomi bagi Penduduk Miskin dan Rentan.;
6. Menurunnya Partisipasi Angkatan Kerja;
7. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman.

Sedangkan Dinas Perumahan dan Permukiman mengampu:

Tujuan :Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman

Indikator :Indeks Kualitas Lingkungan dan Kawasan Permukiman
Pelaksanaan kinerjanya dalam mencapai IKU dan IKD di dukung dari Dinas Lingkungan Hidup Terkait dengan persampahan dan IKLH dan BPBD terkait kebencanaan

Sedangkan pelaksanaannya Dinas Perumahan dan Permukiman menetapkan

Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman dengan indikator sasaran;

1. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak
2. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak
3. Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik

4. Persentase kawasan kumuh
5. Persentase rumah layak huni

Di implementasikan dalam program;

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
4. Program Kawasan Permukiman;
5. Program Pengembangan Perumahan;
6. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
7. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2.1.2 Target Renstra 2024-2026 Dinas Perumahan dan Permukiman

Tabel 2.1.2 Target Renstra 2024-2026 Dinas Perumahan dan Permukiman

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
			2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	89.57 %	89,67%	89,77%	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	1.04%	0,95%	0,96%	
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	86.68 %	86,78%	87,08%	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	2.19%	2,21%	2,26%	
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	54.30 %	58,04%	66,46%	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Terehabilitasi	9.74%	6,98%	14,52%	
		Persentase Penanganan kawasan kumuh	44.29 %	69,24%	84,85%	
	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	100%	100%	100%	
		Persentase rumah layak huni	98.52 %	98,43%	98,55%	
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	100.00%	100,00%	100,00%	
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah di bangun	7.76%	7,34%	7,93%	
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	6.40%	8,25%	8,99%	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80.87	80,87	80,87
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%

2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Demi kesatuan pandangan dalam rangka menunjang pelaksanaan tujuan dan sasaran Pejabat Bupati Jombang Tahun 2024-2026 maka Dinas Perumahan dan Permukiman telah merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan program sesuai tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan Dinas, dengan mengacu pada RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026. Adanya tujuan membuat fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan, dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang optimal. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran berupa rencana-rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan dan kebijakan.

Kebijakan adalah keputusan atau landasan hukum untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program adalah langkah kegiatan yang akan dilakukan dan merupakan penjabaran dari kebijakan. Kebijakan dan Program Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai dengan kebijakan dan program Kabupaten Jombang yang dirumuskan melalui analisis dan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah kebijakan
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman	Percepatan penanganan sanitasi permukiman (tuntas desa /kecamatan)	Meningkatnya kualitas air minum perdesaan serta sanitasi permukiman
		Percepatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat pedesaan / percepatan daerah khusus / rawan air	
		Percepatan penanganan drainase permukiman (luas genangan di perkotaan)	
		Percepatan penanganan sarana dan prasarana kawasan perumahan dan Permukiman	
		Percepatan penanganan rehabilitasi rumah tidak layak huni (tuntas desa / kecamatan)	Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak

2.1.4 Program dan Kegiatan Pembangunan

- 1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - A Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - 2 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - 3 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - 4 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - 5 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
 - A Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan

- Air Limbah Domestik (SPALD)
- 2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- 3 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
- 3 **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**
 - A **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
 - 2 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
 - 3 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
- 4 **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 - A **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - B **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - C **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - 1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - D **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - E **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - F **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - G **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - H **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5 **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**
 - A **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**
 - 1 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
 - 2 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - 3 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 6 **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**
 - A **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**
 - 1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik
 - B **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**

- 1 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
- 7 **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**
 - A Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - 1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - 2 Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh
- 8 **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**
 - A Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - 1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - 2 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
 - 3 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang

2.2 Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Perjanjian kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan beserta dengan indikator kinerja. Sehingga, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, wewenang, dan sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan PK adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi amanah atas kinerja yang telah dan perlu dicapai oleh penerima amanah;
2. Upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Wujud nyata komitmen penerima dan pemberi amanah guna meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; Sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
4. Dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; serta
5. Dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah.

Target dalam perjanjian kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut. Target perjanjian kinerja awal ditetapkan sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun berjalan. Jumlah anggaran yang dialokasikan dalam perjanjian kinerja untuk mencapai target adalah jumlah yang didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran. Berikut adalah pagu anggaran sebelum dan sesudah pergeseran:

Tabel 2.2.1 Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU	PAGU PAK
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9,444,284,224	9,794,284,224
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9,520,091,071	10,482,604,123
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3,944,112,500	3,944,112,500

NO	PROGRAM	PAGU	PAGU PAK
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,663,039,302	7,392,606,826
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	330,616,500	1,766,120,000
6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	9,085,713,682	11,267,204,297
7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3,093,313,850	3,150,854,850
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	903,353,000	1,022,708,500
TOTAL		42,984,524,129	48,820,495,320

Pagu anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman mengalami pergeseran, sehingga terjadi peningkatan anggaran pada tujuh program. Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum meningkat Rp.350,000,000; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah meningkat Rp.962,513,052; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meningkat Rp.729,567,524; Program Pengembangan Perumahan meningkat Rp.1,435,503,500; Program Kawasan Permukiman meningkat Rp.2,181,490,615; Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh meningkat Rp. 57,541,000; serta Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) meningkat Rp.119,355,500.

Tabel 2.2.2 Perubahan Target Program Tahun 2024

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Target PAK
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	1.04%	1.04%
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	2.19%	2.19%
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Terehabilitasi	5.22%	9.74%
4	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	100%	100%
5	Program Pengembangan Perumahan	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	100%	100%
6	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah di bangun	7.76%	7.76%
7	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	6.40%	6.40%
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%

Tabel 2.2.3 Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	89.57%
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	86.68%
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	54.30%
		Persentase Penanganan kawasan kumuh	44.29%
		Persentase rumah layak huni	98.52%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,87

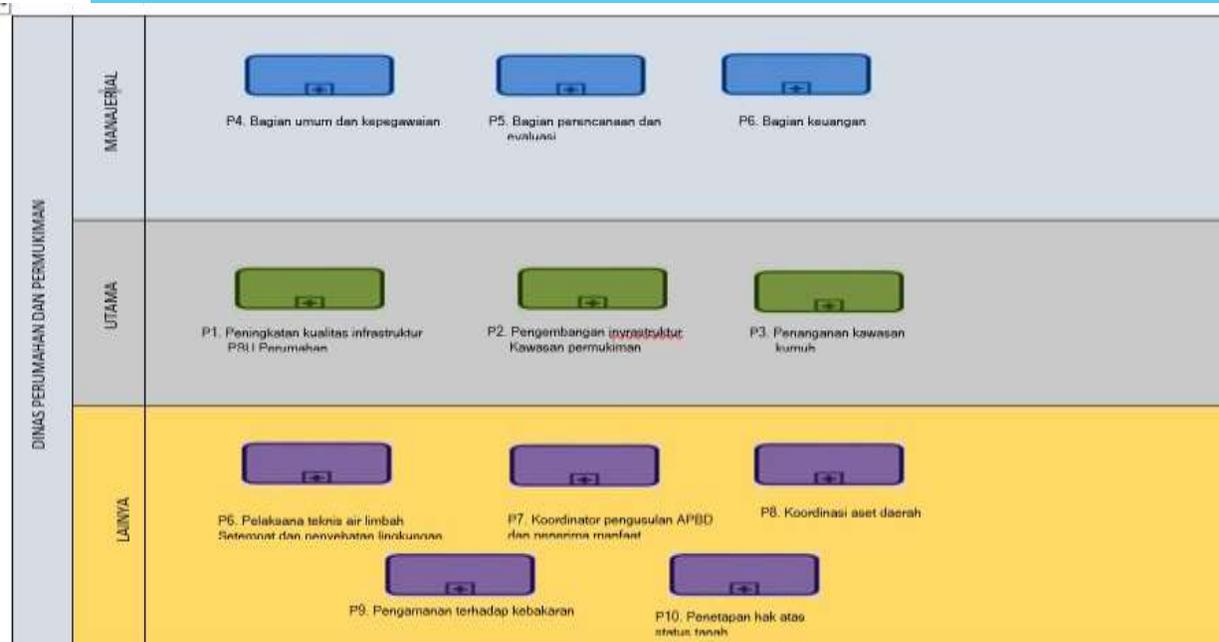
Tabel 2.2.4 Perjanjian Kinerja Program Tahun 2024

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya penyediaan air minum layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	1.04%	9,794,284,224
2	Meningkatnya pemenuhan sanitasi layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	2.19%	10,482,604,123
3	Meningkatnya jaringan drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Terehabilitasi	9.74%	3,944,112,500
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	7,392,606,826
5	Terfasilitasinya rumah korban bencana dan relokasi program kab	Program Pengembangan Perumahan	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	100%	1,766,120,000
6	Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	100%	11,267,204,297
7	Meningkatnya jumlah RT yang mendapatkan akses RTLH	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah di bangun	7.76%	3,150,854,850
8	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	6.40%	1,022,708,500

2.3 CASCADING KINERJA

Cascading adalah gambaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi dengan membagi habis kinerja mulai dari Pimpinan sampai dengan pelaksana, di bagi sesuai dengan tupoksi, peran dan kompetensi pegawai di Dinas Perumahan Dan Permukiman, penataan sumberdaya manusia untuk mencapai hasil secara maksimal baik secara individu, Bidang, maupun Dinasnya.

2.4 PROSES BISNIS



2.4.1 Proses Bisnis Utama

UTAMA

P.1 Peningkatan Kualitas Infrastruktur PSU Perumahan

Perumahan merupakan tempat tinggal yang dibangun oleh pemerintah maupun pengembang dengan pembiayaan dibebankan pada masyarakat, perumahan dibangun dengan beberapa kelas sesuai dengan strata kemampuan ekonomi masyarakat pemakai, pada tahapan proses pembangunan jika sudah lepas dari pengembang sering terjadi penanganan infrastruktur / Prasarana sarana umum terabaikan, apalagi untuk perumahan menengah kebawah dan jika dibiarkan akan berdampak pada kesehatan lingkungan di perumahan, sehingga menjadi perumahan yang tidak layak, sesuai dengan undang-undang no 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman, penanganan PSU perumahan menjadi penekanan khusus dalam pengangan sejak mulai perencanaan, sehingga proses peningkatan kualitas infrastruktur PSU Perumahan menjadi proses utama yang dalam tahapan implementasi lebih lanjut akan dijelaskan pada sub proses

P.2 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman

Pengembangan infrastruktur Kawasan Permukiman merupakan salah satu proses utama Dinas Perumahan Dan Permukiman yang merupakan proses inti dalam Pembangunan/ Rehabilitasi/ pemeliharaan di Kawasan Permukiman dalam prosesnya mencakup seluruh infrastruktur diluar kawasan kumuh dan kawasan perumahan, dan juga termasuk proses penanganan Prasarana Sarana Utilitas Umum di kawasan permukiman dalam Proses bisnis implementasinya dijabarkan pada sub proses Pengembangan Kawasan Permukiman

P.3 Penanganan kawasan kumuh

Kawasan kumuh merupakan kondisi kawasan yang kurang teratur akibat dampak dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk yang tidak sepadan dengan tata ruang pengembangan kawasan sehingga terjadi kawasan kumuh juga merupakan isu strategis nasional dengan menetapkan kawasan kumuh dengan 7 indikator, sesuai runtunan / tahapan penanganan kawasan kumuh tidak serta merta hanya menangani infrastruktur akan tetapi membangun budaya, pola hidup teratur dikawasan kumuh, serta mencegah tumbuhnya kawasan kumuh baru, dalam prosesnya penanganan melibatkan pemangku kepentingan, pemerintah, swasta maupun partisipasi masyarakat sebagai subyek, proses intinya pembangunan infrastruktur seiring dengan pembangunan manusia dalam Proses Bisnis implementasinya dijelaskan pada sub proses penanganan kawasan kumuh

Manajerial

P.4 Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagian umum dan kepegawaian dalam proses bisnis adalah sebagai Manajerial pengatur dan menata serta mengendalikan proses dari sisi kesiapan sumber daya manusia (ASN) penyiapan tenaga profesional yang saip menjalankan proses utama diantaranya menyiapkan tenaga non ASN yang berakhlak, berkompotensi sesuai proses utama yang dijalankan serta menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan proses baik operasional secara sarana peralatan yang

berbasis IT dan operasional mobilitas kegiatan

P.5 Bagian Perencanaan dan evaluasi

Bagian Perencanaan dan Evaluasi dalam proses bisnis adalah sebagai Manajerial pengatur dan menata serta mengendalikan proses dari sisi penyiapan perencanaan guna memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai sesuai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan permukiman dan memberikan kepastian capaian dari proses pelaksanaan dengan mengevaluasi setiap tahapan proses serta menyapaikan progres hasil pada setiap tahapan kepada semua pengampu proses **UTAMA** serta menginventarisasi umpan balik sebagai dasar pelaksanaan tahap berikutnya

P.6 Bagian Keuangan

Bagian Keuangan dalam proses bisnis adalah sebagai Manajerial pensupport serta mengendalikan proses dari sisi penyiapan anggaran guna memberikan kemudahan dan kelancana proses bisnis utama dalam hal pembiayaan serta mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja terhadap kebutuhan anggaran sehingga terjadi efisien dan efektifitas pelaksanaan proses bisnis untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman

Lainnya

P.6 Pelaksana teknis air limbah setempat dan penyehatan lingkungan

Dalam mendukung keberhasilan kegiatan proses utama terutama di sisi Prasarana dan sarana utilitas umum (Air limbah setempat) perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi terutama dinas yang mempunyai kepentingan yang sama tentang penyehatan lingkungan kontribusi dalam supporting data, narasumber dan kolaborasi kegiatan adapun dinas pemangku diantaranya; Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan.

P.7 Koordinasi pengusulan APBD dan Penerima Manfaat

Dalam mendukung keberhasilan kegiatan proses utama terutama di sisi Pengusulan anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman tentu perlu adanya dukungan dari pemerintah desa terkait data penerima manfaat serta kondisinya apakah sudah masuk DTKS, hal ini merupakan awal kegiatan proses yang sangat penting keberhasilan proses utama juga di tentukan standing up data base yang valid

P.8 Koordinasi Aset Daerah

Dalam Pelaksanaan proses utama pada tahap penetapan kegiatan awal tentu harus ada kepastian terhadap asset yang akan dilakukan pembangunan/ rehabilitasi / dan pemeliharaan sehingga anggaran yang dilaksanakan oleh proses utama dapat efisien sesuai dengan asset kewenangan dinas perumahan dan permukiman sehingga koordinasi dengan dinas pengampu sangat penting dilakukan untuk memastikan keberhasilan proses utama

P.9 Pengamanan terhadap kebakaran

Salah satu proses utama dinas perumahan dan permukiman adalah penanganan kawasan kumuh dan salah satu keberhasilan dalam penanganannya adalah adanya jaminan terhadap keamanan dari kebakaran sehingga peran dinas

pengampu ini sangat dipelukan dan proses utama dan dinas pemangku adalah BPBD

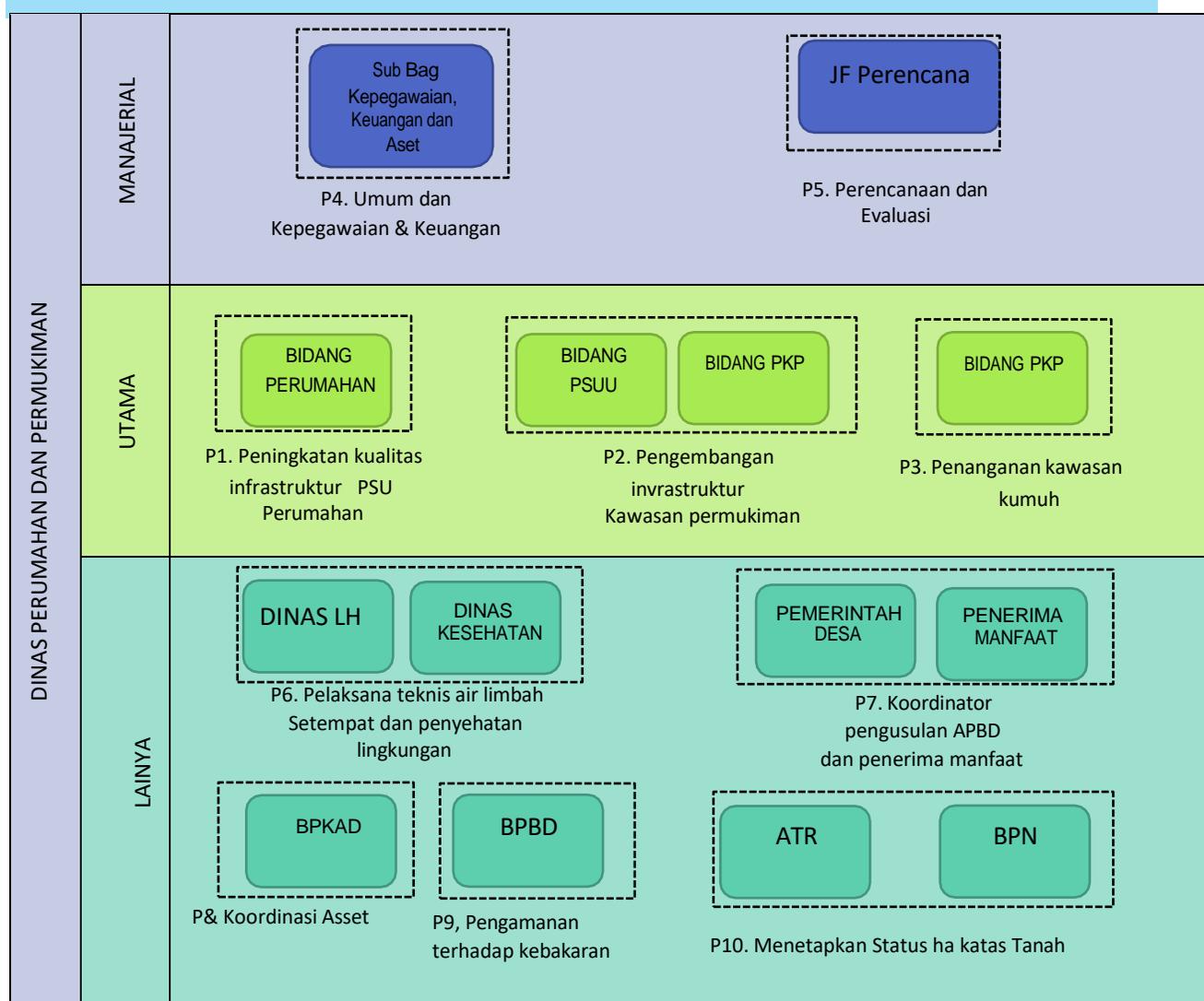
P.10 Penetapan hak atas status tanah

Pembangunan perumahan dan permukiman sangat erat kaitannya terhadap status hak tanah diantaranya

- Aset PSU perumahan
- Aset sarana dan prasarana Air bersih
- Pembangunan RTLH

Diperlukan kejelasan status kepemilikannya untuk dapat dilaksanakan pemeliharaan dan pembangunan, dalam proses utama pemeliharaan PSU perumahan diperlukan BA penyerahan asset PSU dari pengembang kepada pemerintah Daerah, pembangunan rumah layak huni di perlukan kepemilikan sah atas tanah bagi RTLH yang dibangun sehingga di perlukan koordinasi untuk mendukung peberhasilan proses utama, dinas pemangku; BPKAD, Pemerintah Desa, BPN.

PETA RELASI



Peta Relasi merupakan gambaran hubungan keterkaitan dalam melaksanakan proses bisnis pada Dinas Perumahan dan Permukiman, untuk mencapai keberhasilan proses utama pada bidang bidang perlu adanya hubungan relasi untuk saling mendukung dan pencapaian misalkan:

- Penyediaan / peningkatan Rumah layak huni salah satu persyaratan adalah 1. Layak Struktur, 2. Layak Ruang, dan 3. Layak Kesehatan lingkungan,

Layak kesehatan lingkungan minimal harus tersedia jamban / IPAL individu itu berarti peningkatan rumah layak huni mendukung target capaian penyediaan Sanitasi layak pada Bidang PSUU dan pembangunan RTLH merupakan salah satu indikator penanganan kawasan kumuh berarti juga mendukung capaian kinerja bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dalam hal penanganan kawasan kumuh;

- Proses penyediaan Air Minum Layak indikator capaiannya juga berdampak pada capaian penanganan kawasan kumuh dan penanganan Prasarana sarana utilitas umum pada permukiman;
- Proses penanganan genangan perkotaan dengan pembangunan jaringan drainase dalam kondisi baik, dengan terselisainya masalah genangan perkotaan maka kumuh dikawasan perkotaan dan perumahan akan tertangani

Relasi yang menjadi irisan dalam proses kinerja internal dinas perumahan dan permukiman sangatlah erat dan saling tergantung satu sama lain dalam pencapaian kinerjanya, maka dapat disimpulkan secara internal proses bisnis dalam pencapaian kinerja tidak akan berhasil jika diantara bidang ada yang gagal.

2.5 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi merupakan hasil penilaian secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024 adapun hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Melaksanakan reuiu IKU secara berkala dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (inovatif serta relevan dengan kondisi yang sedang berjalan);
2. Memanfaatkan informasi kinerja yang disajikan untuk meningkatkan kinerja yang bersifat ekstensif dan menyeluruh dengan melampirkan bukti yang cukup bahwa informasi dalam laporan kinerja (termasuk laporan kinerja tahun sebelumnya) telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik pada periode berikutnya;
3. Memanfaatkan informasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja secara maksimal dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari hasil evaluasi program dan memberikan bukti yang cukup bahwa informasi dalam laporan kinerja (realisasi dan capaian tahun sebelumnya) telah digunakan untuk perbaikan perencanaan capaian kinerja organisasi pada periode berikutnya yang dituangkan dalam Berita Acara;
4. Melakukan perbaikan pada dokumen monitoring rencana aksi dengan melengkapi tindak lanjut dalam bentuk langkah langkah nyata atas rekomendasi pada suatu periode/suatu tahap perencanaan program/kegiatan yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi;
5. Membuat rencana aksi yang strategis dalam upaya meningkatkan pencapaian tujuan/sasaran OPD yang ditetapkan dengan memperhatikan perubahan kondisi pada perencanaan kinerja berikutnya dengan rekomendasi/saran tindak lanjut yang disajikan dalam LKJIP tahun sebelumnya.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	90.29	90.49	100.22%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	1.01%	3.07%	303.96%
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	86.68	86.70	100.02%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	2.19%	2.33%	106.39%
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	54.30	59.65	102.60%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Terehabilitasi	9.74%	20.31%	178.54%
		Persentase Penanganan kawasan kumuh	44.29	48.74	110.05%
	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	100%	100%	100.00%
		Persentase rumah layak huni	98.52	98.65	100.13%
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	100%	100%	100.00%
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah dibangun	7.76%	16.00%	206.19%
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	6.40%	6.40%	100.00%
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80.87	81.46
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100.00%

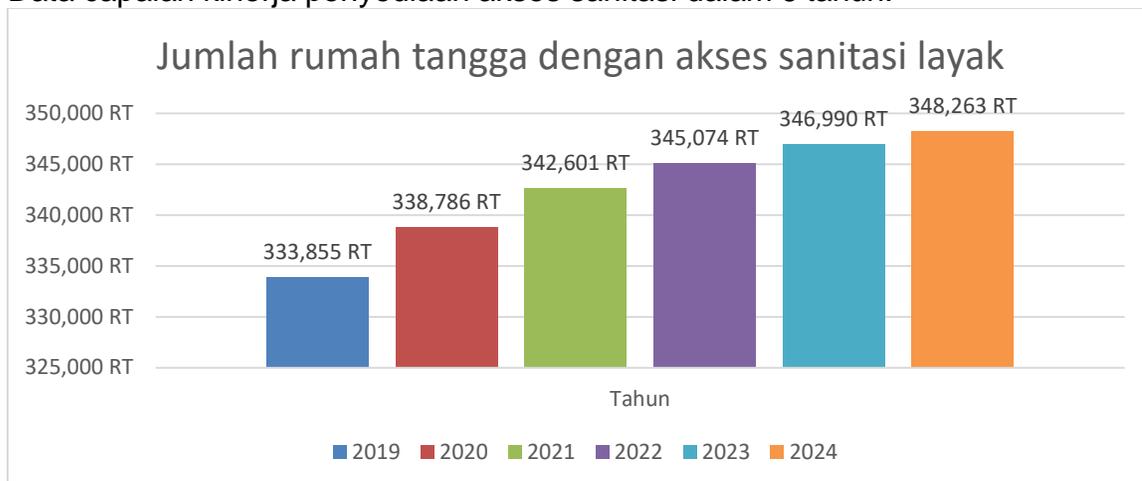
Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman yang menjadi penetapan kinerja pada Tahun 2024 dapat tercapai.

Upaya yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kinerja diantaranya penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan infrastruktur, percepatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat, percepatan penanganan drainase permukiman, percepatan penanganan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Adapun analisa capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis dengan nilai rentang capaian yang terealisasi masuk dalam skala Kategori sebagai berikut:

- Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak dengan nilai realisasi capaian sebesar 100,02% masuk dalam kategori Sangat Tinggi;

Indikator Persentase Pemenuhan Sanitasi Layak dari rencana 86,68% (348.190 RT/KK) dengan jumlah rumah tangga se-Kabupaten Jombang 401.700 RT/KK sampai dengan akhir 2024 terlayani 86,70% (348.263 RT/KK) atau tercapai 100,02%. Hal ini disebabkan oleh realisasi akses sanitasi layak (1.273 RT/KK) yang melebihi target (1.200 RT/KK). Penyerapan anggaran sebesar 95,92% dari rencana pagu anggaran Rp. 10.482.604.123 terserap Rp. 10.054.941.737.

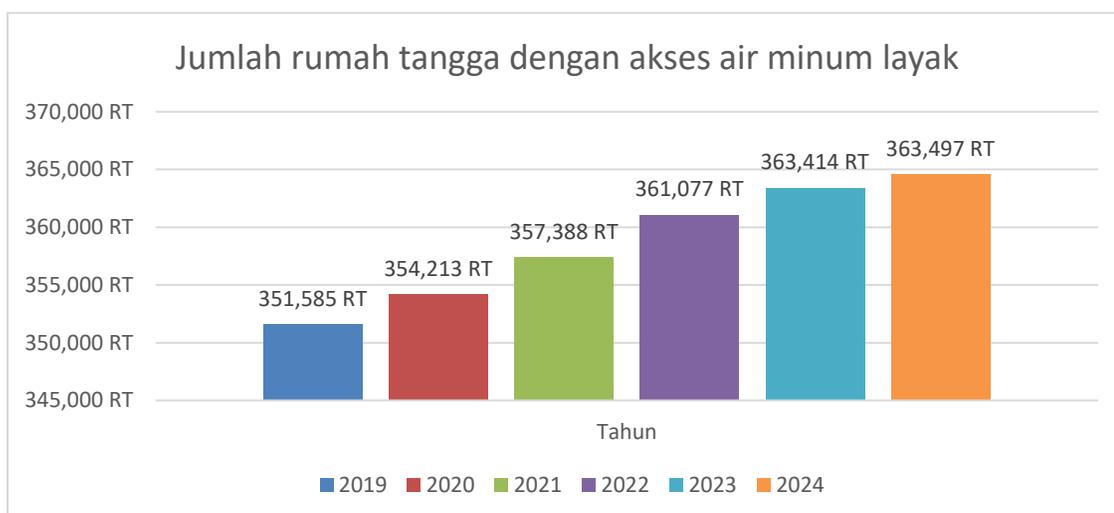
Data capaian kinerja penyediaan akses sanitasi dalam 6 tahun:



- Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dengan nilai realisasi capaian sebesar **100,22%** masuk dalam kategori Sangat Tinggi;

Indikator Persentase Pemenuhan Air Minum Layak dari rencana 90,29% (362.687 RT/KK) dengan jumlah rumah tangga se-Kabupaten Jombang 401.700 RT/KK sampai dengan akhir 2024 terlayani 90,49% (363.497 RT/KK) atau tercapai 100,22%. Hal ini disebabkan oleh realisasi akses sanitasi layak (1.210 RT/KK) yang melebihi target (400 RT/KK). Penyerapan anggaran sebesar 99,71% dari rencana pagu anggaran Rp. 9.794.284.224 terserap Rp. 9.765.738.169.

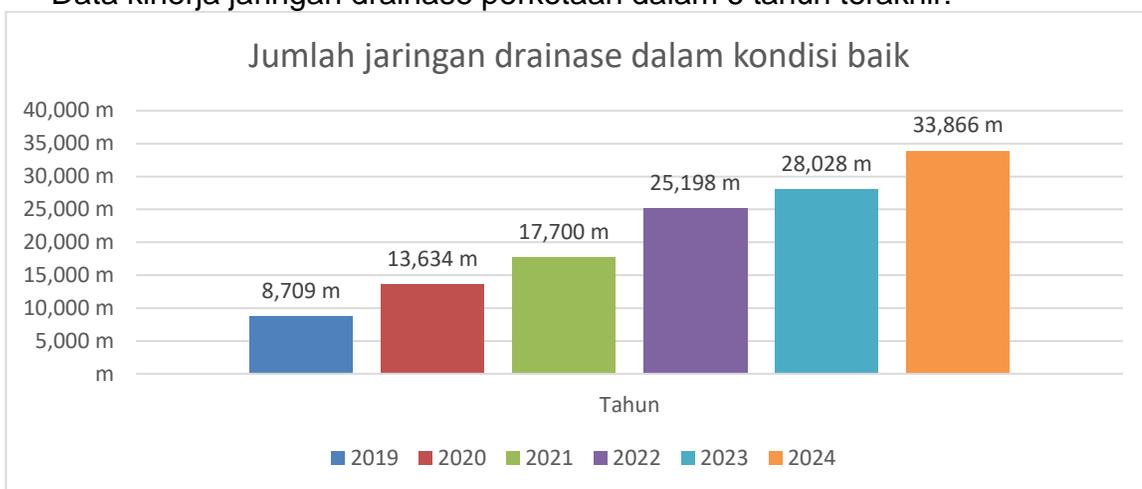
Data capaian kinerja penyediaan akses air minum dalam 6 tahun:



- Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik dengan nilai realisasi capaian sebesar **102,60%** masuk dalam kategori Sangat Tinggi;

Indikator persentase drainase dalam kondisi baik dengan tujuan mengurangi areal genangan terutama di kawasan perkotaan dengan rencana sampai dengan tahun 2024 adalah peningkatan jaringan drainase dengan rencana 54,30% (30.827 m) dari total panjang jaringan drainase 56.775 m kawasan perkotaan, terealisasi 59.65% (33.866 m) dengan capaian kinerja 109,85%. Penyerapan anggaran sebesar 82,35% dari pagu anggaran Rp.3.944.112.500 terealisasi Rp.3.248.073.030.

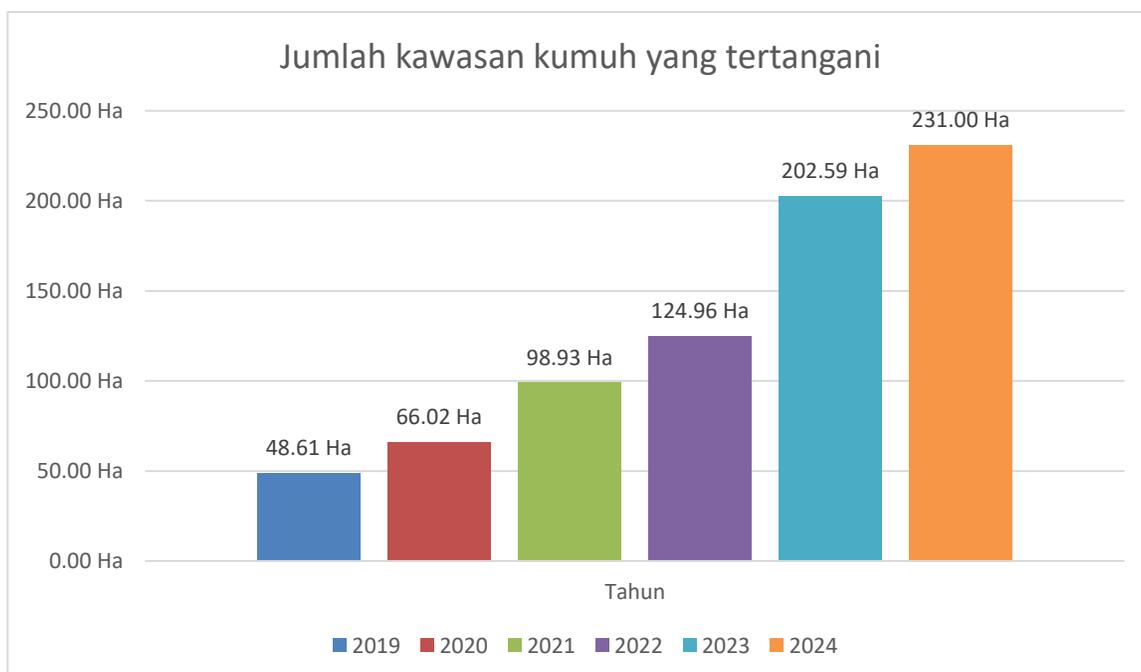
Data kinerja jaringan drainase perkotaan dalam 6 tahun terakhir:



- Persentase kawasan kumuh yang tertangani dengan nilai realisasi capaian sebesar **110,05%** masuk dalam kategori Sangat Tinggi

Indikator Persentase Penanganan Kawasan Kumuh, sesuai SK BUPATI JOMBANG No:188.4.45/318/415.10.1.3/2020 tentang Kawasan Kumuh, ditetapkan luas kawasan kumuh 474.71 Ha. Target penanganan tahun 2024 sebesar 44,29% (210 Ha) terealisasi 48,74% (231 Ha), sehingga tercapai 110,05%. Penyerapan anggaran sebesar 95,69% dari pagu Rp. 11.267.204.297 terealisasi Rp.10.781.584.101.

Data penanganan kawasan kumuh dalam 5 (lima) tahun:



- Persentase rumah layak huni dengan nilai realisasi capaian sebesar **100,13%** masuk dalam kategori Sangat Tinggi;

Indikator Persentase Rumah Layak Huni dengan rencana sampai dengan tahun 2024 98,52% (395.760 RT/KK) dari 401.700 rumah tangga di Kabupaten Jombang terealisasi 98,65% (396.294 RT/KK); maka tercapai 100,13%. Penyerapan anggaran sebesar 72,86% dari pagu anggaran Rp.5.939.683.350 terealisasi Rp.4.327.776.846.

Data kinerja rumah layak huni dalam 6 tahun terakhir:



3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan 2 tahun terakhir

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			2022	2023	2024	
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERKIM SESUAI PERMENDAGRI 90						
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	85.59%	85.90%	-	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani	2.03%	4.18%	-	-
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	89.22%	89.89%	-	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	2.26%	8.33%	-	-
	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	42.80%	44.38%	-	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Yang Terbangun / Terehabilitasi	16.89%	19.19%	-	-
	Persentase Penanganan kawasan kumuh	25.32%	26.32%	-	-	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100.00%	100.00%	-	-

Sasaran Strategis - Program		Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				2022	2023	2024
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	5.65%	6.93%	-	-
		Persentase rumah layak huni	97.93%	98.11%	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	5.26%	8.77%	-	-
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	10.74%	18.43%	-	-
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	80.22	80.87	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100.00%	100.00%	-	-
PERUBAHAN RENSTRA SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889						
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	86.20%	-	86.38%	-
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani	2.12%	-	3.38%	-
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	90.14%	-	90.47%	-
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak	2.46%	-	5.75%	-
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	48.79%	-	49,37%	-
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun / Terehabilitasi	7.92%	-	8,96%	-
		Pesentase Penanganan kawasan kumuh	38.85%	-	42.68%	-
	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	100.00%	-	100.00%	-
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	17.00%	-	22.19%	-
		Persentase rumah layak huni	98.36%	-	98.40%	-
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	6.00%	-	6.00%	-
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	13.17%	-	15.19%	-
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80.39	-	80.39	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100.00%	-	100.00%	-
PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023						

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			2022	2023	2024	
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	90.57	-	-	90.77
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	1.04%	-	-	3.16%
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	86.68	-	-	86.70
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	2.19%	-	-	2.33%
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	54.30	-	-	55.71
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Terehabilitasi	9.74%	-	-	17.39%
		Pesentase Penanganan kawasan kumuh	44.29	-	-	48.74
	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	100%	-	-	100%
		Persentase rumah layak huni	98.52	-	-	98.65
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	100%	-	-	100%
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah di bangun	7.76%	-	-	16.00%
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	6.40%	-	-	6.40%
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80.87	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	-	-	100%

Perencanaan Dinas Perumahan dan Permukiman beracuan pada Perubahan Renstra sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (untuk dan 2022), dan perubahan renstra sesuai KEPMENDAGRI 050-5889 (kinerja tahun 2023), serta Permendagri 900 (kinerja 2024). Namun, tidak terdapat perbedaan program yang signifikan.

3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah

Tabel 3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	89.77%	90.77%	101.11%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	0.96%	3.16%	329.17%
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	87.08%	86.70%	99.56%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	2.26%	2.33%	103.10%
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	66.46%	55.71%	83.82%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Terehabilitasi	14.52%	17.39%	119.77%
		Persentase Penanganan kawasan kumuh	84.85%	48.74%	57.44%
	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	100%	100%	100.00%
		Persentase rumah layak huni	98.55%	98.65%	100.10%
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	100%	100%	100.00%
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah di bangun	7.93%	16.00%	201.77%
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	8.99%	6.40%	71.19%
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80.87	81.46
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100.00%

Berdasarkan Tabel 3.1.3 diketahui bahwa tingkat kemajuan capaian renstra hingga tahun 2026, masih ada program dan indikator kinerja sasaran strategis yang belum memenuhi target renstra, namun telah memenuhi target tahunan.

3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 di level nasional

Tabel 3.1.4 Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET.
Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau	Persentase Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Permukiman yang Layak dan Aman Melalui Pendekatan Smart Living	89.17%	83.89%	94.08%	1) persentase rumah tangga dengan akses air minum layak memiliki capaian sebesar 95,41%; 2) persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman memiliki capaian sebesar 92,46%.
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah	59.05%	58.99%	99.90%	-

	Layak Huni				
--	------------	--	--	--	--

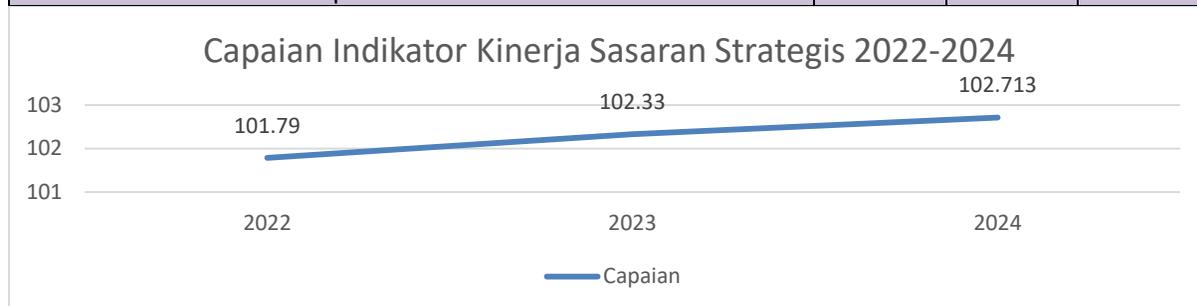
Capaian kinerja Kementerian PUPR pada kedua indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dibawah 100%. Kedua IKSS Kementerian PUPR tersebut sesuai dengan IKSS Dinas Perumahan dan Permukiman dengan capaian diatas 100%.

3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja menggambarkan keberhasilan dalam melaksanakan indikator utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, pada dasarnya capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 diatas 100%. Rataan capaian indikator kinerja sasaran strategis dari tahun 2022 secara berturut-turut yaitu 101,79%; 102,33%; dan 102,60%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman mengalami kenaikan tiap tahun.

Tabel 3.1.5.1 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	100.36%	100.21%	100.02%
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	100.75%	100.37%	100.22%
	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	103.69%	101.19%	109.85%
	Persentase penanganan kawasan kumuh	103.95%	109.86%	110.05%
	Persentase rumah layak huni	100.18%	100.04%	100.13%
Capaian Rata-Rata		101.79%	102.33%	102.71%



Tabel 3.1.5.2 Target Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Jumlah Warga Negara yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Warga Negara yang Terlayani	Capaian	Batas Waktu Pencapaian	Ket.
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	38 Unit (RT/KK)	38 Unit (RT/KK)	100,00%	Setiap Tahun	Dihitung per rumah tangga
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh program fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-(RT/KK)	-(RT/KK)	-	Setiap Tahun	Relokasi dilakukan sementara dengan memfasilitasi sewa

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan anggaran

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	90.57	90.77	100.22%	9,794,284,224	9,765,738,169	99.71%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak per tahun	1.04%	3.16%	303.85%	9,794,284,224	9,765,738,169	99.71%
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	86.68	86.70	100.02%	10,482,604,123	10,054,941,737	95.92%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani per tahun	2.19%	2.33%	106.39%	10,482,604,123	10,054,941,737	95.92%
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	54.30	55.71	109.85%	3,944,112,500	3,248,073,030	82.35%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Terehabilitasi	9.74%	17.39%	178.54%	3,944,112,500	3,248,073,030	82.35%
		Persentase Penanganan kawasan kumuh	44.29	48.74	110.05%	11,267,204,297	10,781,584,101	95.69%
	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	100%	100%	100.00%	11,267,204,297	10,781,584,101	95.69%
		Persentase rumah layak huni	98.52	98.65	100.13%	5,939,683,350	4,327,776,846	72.86%
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	100%	100%	100.00%	1,766,120,000	411,832,050	23.32%
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah di bangun	7.76%	16.00%	206.19%	3,150,854,850	2,989,813,431	94.89%
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	6.40%	6.40%	100.00%	1,022,708,500	926,131,365	90.56%
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80.87	81.46	100.73%	7,392,606,826	6,732,467,861

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	% Capaian
Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100.00%	7,392,606,826	6,732,467,861	91.07%
Capaian Rataan Indikator Sasaran Strategis					102.713%	48,820,495,320	44,910,581,744	91.99%
Capaian Rataan Program					149.37%			

Pagu anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2024 yaitu Rp.48.820.495.320 dengan penyerapan anggaran Rp.44.910.581.744 (91,99%). Capaian penyerapan anggaran tertinggi yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar 99,71%; sedangkan penyerapan terendah Program Pengembangan Perumahan sebesar 23,32%. Rendahnya penyerapan diakibatkan dengan adanya penambahan anggaran pada triwulan IV 2024, namun pembebasan tanah membutuhkan waktu 6 bulan. Sehingga, anggaran tidak terserap dan akan dianggarkan pada tahun 2025 untuk relokasi korban bencana. Pagu anggaran 2024 yang terserap digunakan Dinas Perumahan dan Permukiman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sebagai berikut:

1. Melanjutkan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman, yang terdiri dari sanitasi, akses air minum, drainase, penanganan kawasan kumuh, dan rumah layak huni;
2. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak dengan 86,68% (348.190 RT/KK) terealisasi 86,70% (348.263 RT/KK) atau tercapai 100,02%;
3. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dengan target 90,57% (363.814 RT/KK) terealisasi 90,77% (364.624 RT/KK) atau tercapai 100,22%;
4. Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik dengan target peningkatan jaringan drainase 54,30% (30.827 m) dari total panjang jaringan drainase 56.775 m kawasan perkotaan, terealisasi 59,85% (33.866 m) dengan capaian kinerja 109,85%
5. Target penanganan tahun 2024 sebesar 44,29% (210 Ha) terealisasi 48,74% (231 Ha), sehingga tercapai 110,05%;
6. Persentase rumah layak huni dengan rencana sebesar 98,52% (395.760 RT/KK) terealisasi 98,65% (396.294 RT/KK); maka tercapai 100,13%.

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.2.2.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Program

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	303.85%	99.71%	204.14%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	106.39%	95.92%	10.47%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Terehabilitasi	178.54%	82.35%	96.19%
	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	100.00%	95.69%	4.31%

	Program Pengembangan Perumahan	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	100.00%	23.32%	76.68%
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah di bangun	206.19%	94.89%	111.30%
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	100.00%	90.56%	9.44%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100.00%	91.07%	8.93%

Efisiensi diperoleh dengan menghitung selisih capaian target dengan capaian penyerapan anggaran. Nilai efisiensi program pada Dinas Perumahan dan Permukiman dari tertinggi hingga terendah yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar 204,14%; Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 111,30%; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 96,19%; Program Pengembangan Perumahan 76,68%; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 10,74%; Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 9,44%; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8,93%; serta Program Kawasan Permukiman 4,31%. Sehingga masing-masing program memiliki efisiensi. Hal ini menandakan bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman bisa merealisasikan target dengan menggunakan anggaran kurang dari pagu.

3.2.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	100.22%	99.71%	0.51%
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	100.02%	95.92%	4.10%
	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	109.85%	82.35%	20.24%
	Persentase Penanganan kawasan kumuh	110.05%	95.69%	14.36%
	Persentase rumah layak huni	100.13%	72.86%	27.27%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	100.73%	91.07%	9.66%

Efisiensi indikator kinerja sasaran strategis tertinggi hingga terendah secara berturut-turut yaitu Persentase rumah layak huni sebesar 27,27%; Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik 20,24%; Persentase Penanganan kawasan kumuh 14,36%; Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah 9,66%; Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak 4,01%; serta Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak 0,51%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih rendahnya realisasi penyerapan anggaran dibandingkan capaian kinerja target, sehingga semua indikator sasaran strategis tercapai melebihi target dan terjadi efisiensi. Sehingga, rataan capaian indikator sasaran strategis yaitu 102,713% dengan penyerapan anggaran 91,99% terjadi efisiensi 10,72%.

3.2.2.3 Efisiensi Sumber Daya Manusia

Tabel 3.2.2.3 Analisis Jabatan Pegawai Tahun 2024

NO	JABATAN	KLS	B	K	SELISIH
	KEPALA DINAS	14	1	1	-
	JABATAN FUNGSIONAL				
1	PERENCANA AHLI MADYA	12	-	1	(1)
2	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MADYA	12	-	1	(1)
3	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MADYA	11	-	3	(3)
4	PENATA RUANG AHLI MADYA	11	-	1	(1)
5	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MADYA	11	-	5	(5)
	SEKRETARIS	12	1	1	-
	JABATAN FUNGSIONAL				
1	PERENCANA AHLI MUDA	10	1	1	-
2	PERENCANA AHLI PERTAMA	8	-	1	(1)
	JABATAN PELAKSANA				
1	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	-	1	(1)
2	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	7	-	2	(2)
3	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	-	1	(1)
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASET	9	1	1	-
	JABATAN PELAKSANA				
1	BENDAHARA	7	1	1	-
2	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	7	-	1	(1)
3	PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	6	1	1	-
4	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	6	1	1	-
5	PENGELOLA DATA BELANJA DAN LAPORAN KEUANGAN	6	-	1	(1)
6	VERIFIKATOR KEUANGAN	6	-	1	(1)
7	PENGELOLA DATA PENCAIRAN DANA	6	1	1	-
8	PENGELOLA KEUANGAN	6	-	1	(1)
9	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	6	-	1	(1)
10	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	1	1	-
11	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1	1	-
12	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	5	1	2	(1)
	KEPALA BIDANG PERUMAHAN	11	1	1	-
	JABATAN FUNGSIONAL				
1	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA	9	3	3	-
2	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	8	-	1	(1)
3	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA	10	-	1	(1)
4	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	8	-	1	(1)
	JABATAN PELAKSANA				
1	ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	7	1	1	-
2	ANALIS PERUMAHAN	7	1	1	-
3	PENGAWAS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	7	-	2	(2)
4	PENGELOLA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	6	1	2	(1)
NO	JABATAN	KLS	B	K	SELISIH
5	JURU SURVEI PERMUKIMAN PERUMAHAN	5	-	1	(1)
	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	11	1	1	-
	JABATAN FUNGSIONAL				
1	PENATA RUANG AHLI MUDA	9	1	1	-
2	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	8	-	1	(1)
3	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA	9	2	2	-
4	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	8	-	1	(1)
	JABATAN PELAKSANA				
1	ANALIS INFRASTRUKTUR	7	-	2	(2)
2	PENELAHAH BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	7	-	2	(2)
3	PENYUSUN RENCANA PEMANFAATAN KAWASAN	7	-	2	(2)
4	PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN	6	1	3	(2)
5	PENGELOLA DATA	6	-	1	(1)
	KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	11	1	1	-
	JABATAN FUNGSIONAL				
1	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA	9	3	3	-
2	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	8	-	1	(1)
	JABATAN PELAKSANA				
1	ANALIS INFRASTRUKTUR	7	1	2	(1)
2	PENGELOLA INSTALASI AIR DAN LISTRIK	6	-	2	(2)
3	PENGELOLA GEOLOGI, TATA LINGKUNGAN DAN AIR BAWAH TANAH	6	1	1	-
4	PENGELOLA LIMBAH	6	-	2	(2)
5	TEKNISI AIR	5	1	1	-
6	PEMELIHARA BANGUNAN	5	1	1	-
JUMLAH			31	77	(46)

Analisa kebutuhan Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2024

dibutuhkan 77 orang. Namun, jumlah PNS yang ada adalah 31 orang, sehingga selisih kebutuhan pegawai adalah 46 orang. Kekurangan pegawai ini tidak berdampak buruk pada capaian kinerja dinas. Hal ini dibuktikan dengan rataan capaian strategis 102,713% dan rataan capaian program sebesar 149,37% dengan penyerapan anggaran 91,99%. Sehingga, kekurangan pegawai tidak menghambat kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabuapten Jombang.

3.2.2.4 Efisiensi Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024	RKBMD 2025				JUMLAH
			PENGADAAN	PENGHAPUSAN	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8 =3+4-5-6-7
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	-	-	-	-	1
2	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2	-	-	-	-	2
3	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	2	-	-	-	-	2
4	Tanah Untuk Bangunan Masjid	1	-	-	-	-	1
5	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	6	-	-	-	-	6
6	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5	-	-	-	-	5
7	Tanah Lapangan Badminton/Bulutangkis	5	-	-	-	-	5
8	Tanah Lapangan Sepak Bola	2	-	-	-	-	2
9	Tanah Lapangan Bola Volly	1	-	-	-	-	1
10	Tanah Lapangan Lainnya	1	-	-	-	-	1
11	Tanah Untuk Jalan Nasional	29	-	-	-	-	29
12	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	14	-	-	-	-	14
13	Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	43	-	-	-	-	43
14	Tanah Untuk Makam Umum	1	-	-	-	-	1
15	Tanah Lapangan Taman lainnya	4	-	-	-	-	4
16	loader lainnya (dst)	1	-	-	-	-	1
17	Sumersible Pump	4	-	-	-	-	4
18	Pompa Air	4	-	-	-	-	4
19	mesin bor lainnya (dst)	1	-	-	-	-	1
20	Station Wagon	4	-	-	-	-	4
21	Pick Up	2	-	-	-	-	2
22	Sepeda Motor	24	-	-	-	-	24
23	Mobil Tinja	1	-	-	-	-	1
24	ILS. Calibration RX.	3	-	-	-	-	3
25	alat ukur universal lainnya (dst)	8	-	-	-	-	8
26	Rak-Rak Penyimpan	1	-	-	-	-	1
27	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	1	-	-	-	-	1
28	Lemari Besi/Metal	14	-	-	-	-	14
29	Lemari Kayu	5	-	-	-	-	5
30	Rak Besi	21	-	-	-	-	21
31	Rak Kayu	17	-	-	-	-	17
32	CCTV - Camera Control Television System	7	-	-	-	-	7
33	Alat Penghancur Kertas	2	-	-	-	-	2
34	Filing Cabinet Besi	9	-	-	-	-	9
35	Dispenser	-	-	-	-	-	-
36	Mesin Absensi	1	-	-	-	-	1
37	Meja Kerja Kayu	14	-	-	-	-	14
38	Kursi Besi/Metal	21	-	-	-	-	21
39	Kursi Besi/Metal	55	-	-	-	-	55
40	Kursi Kayu	1	-	-	-	-	1

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024	RKBMD 2025				JUMLAH
			PENGADAAN	PENGHAPUSAN	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8 =3+4-5-6-7
41	Meja Rapat	1	-	-	-	-	1
42	Meja Panjang	2	-	-	-	-	2
43	Meja Kartu	1	-	-	-	-	1
44	Meja 1/2 Biro	3	-	-	-	-	3
45	Kursi Tamu	1	-	-	-	-	1
46	Kursi Biasa	40	-	-	-	-	40
47	Sofa	2	1	-	-	-	2
48	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	-	-	-	-	1
49	Lemari Es	1	-	-	-	-	1
50	A.C. Window	15	3	-	-	-	18
51	Televisi	1	1	-	-	-	2
52	Sound System	3	-	-	-	-	3
53	Wireless	1	-	-	-	-	1
54	Unit Power Supply	1	-	-	-	-	1
55	Tangga Aluminium	2	-	-	-	-	2
56	Handy Cam	1	-	-	-	-	1
57	Gordyin/Kray	4	-	-	-	-	4
58	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	-	-	-	-	4
59	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	-	-	-	-	1
60	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	-	-	-	-	6
61	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11	-	-	-	-	11
62	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	35	-	-	-	-	35
63	Meja Tamu Ruangan Tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD	38	-	-	-	-	38
64	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	7	-	-	-	-	7
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	-	-	-	-	6
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	-	-	-	-	11
67	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	35	-	-	-	-	35
68	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	3	-	-	-	-	3
69	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	10	-	-	-	-	10
70	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	-	-	-	-	1
71	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	-	-	-	-	1
72	Camera Electronic	8	-	-	-	-	8
73	Layar Film/Projector	10	-	-	-	-	10
74	LCD Monitor	1	-	-	-	-	1
75	Camera Conference	1	-	-	-	-	1
76	Concrete Hammer Set	3	-	-	-	-	3
77	Theodolite (Peralatan Hidrologi)	1	-	-	-	-	1
78	Alat Khusus Keamanan Lainnya	12	-	-	-	-	12
79	Komputer Jaringan lainnya	1	-	-	-	-	1
80	P.C Unit	15	2	-	-	-	17
81	Lap Top	17	4	-	-	-	21
82	Hard Disk	2	-	-	-	-	2
83	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29	3	-	-	-	32
84	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	-	-	-	-	3
85	External	10	-	-	-	-	10
86	Server	1	-	-	-	-	1
87	Peralatan Komputer lainnya	1	-	-	-	-	1
88	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	-	-	-	-	2
89	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2	-	-	-	-	2
90	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	7	-	-	-	-	7

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024	RKBMD 2025				JUMLAH
			PENGADAAN	PENGHAPUSAN	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8 =3+4-5-6-7
91	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	5	-	-	-	-	5
92	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	-	-	-	-	1
93	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	3	-	-	-	-	3
94	Taman Permanen	11	-	-	-	-	11
95	Taman lainnya	5	-	-	-	-	5
96	Makam Bersejarah	6	-	-	-	-	6
97	Monomen/Bangunan Bersejarah Lainnya	7	-	-	-	-	7
98	Jalan Kabupaten Lokal	2	-	-	-	-	2
99	Jalan Kabupaten Lain-lain	5	-	-	-	-	5
100	Jalan Desa	650	3	-	-	-	653
101	Jalan Desa Lain-lain	4	-	-	-	-	4
102	Jalan Khusus Kompleks	589	-	-	-	-	589
103	Jalan Khusus Lainnya	4	-	-	-	-	4
104	Jembatan Pada Jalan Desa	6	2	-	-	-	8
105	Jembatan Gantung	3	-	-	-	-	3
106	Waduk Dengan Bendungan, Tanggul, Menara Pengambilan Pelimpah Ban	1	-	-	-	-	1
107	Bangunan Waduk a Lain-lain	1	-	-	-	-	1
108	Saluran Pasang Tertutup/Terowongan	4	-	-	-	-	4
109	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	1	-	-	-	-	1
110	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	5	-	-	-	-	5
111	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	1	-	-	-	-	1
112	Bangunan Saluran lain-lain	3	-	-	-	-	3
113	Saluran Drainage	822	3	-	-	-	825
114	Bangunan Pelimpah Banjir	1	-	-	-	-	1
115	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	1	-	-	-	-	1
116	Bangunan Pengambilan Dari Sumber Air	1	-	-	-	-	1
117	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	18	-	-	-	-	18
118	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	35	-	-	-	-	35
119	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	6	-	-	-	-	6
120	Saluran Pengumpul Air Hujan	1	-	-	-	-	1
121	Bangunan Waduk Air Kotor Lain-lain	1	-	-	-	-	1
122	Bangunan Pembuang Air Kotor Lain-lain (dst)	29	2	-	-	-	31
123	Bangunan Pompa Air Hujan	1	-	-	-	-	1
124	Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	1	-	-	-	-	1
125	Penampungan Air Hujan (PAH)	2	-	-	-	-	2
126	Sumur Gali (SGL)	5	-	-	-	-	5
127	Sumur Resapan	43	-	-	-	-	43
128	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)	1	-	-	-	-	1
129	Instalasi Air Kotor Lain-lain	1	-	-	-	-	1
130	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	1	-	-	-	-	1
131	Jaringan Pembawa Lain-lain	35	8	-	-	-	43
132	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	1	-	-	-	-	1
133	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	5	-	-	-	-	5
134	Buku Umum Lain-lain	1	-	-	-	-	1

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024	RKBMD 2025				JUMLAH
			PENGADAAN	PENGHAPUSAN	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8 =3+4-5-6-7
135	Bola Dunia (Globe)	1	-	-	-	-	1
136	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	19	-	-	-	-	19
JUMLAH		3,062	32	-	-	-	3,093

Dari table diatas, diketahui bahwa jumlah PC sebanyak 15 unit dan laptop 17 unit. Jumlah PNS Dinas Perumahan dan Permukiman sebanyak 31 orang dengan 20 tenaga administrasi non ASN. Hal ini menyebabkan adanya kekurangan PC ataupun laptop untuk menunjang pekerjaan. Namun, kekurangan sarpras kantor ini tidak menyebabkan kegagalan dinas dalam mencapai target tahunannya.

Tabel 3.2.2.5 Perbandingan Sarpras Kantor dengan Anjab dan Capaian Kinerja

SARPRAS BMD		ANJAB			TENAGA ADMINISTRASI NON ASN	CAPAIAN KINERJA 2024
PC	LAPTOP	B	K	SELISIH		
15 Unit	17 Unit	31 orang	77 orang	46 orang	20 orang	102,60%

Sarpras kantor untuk menunjang pekerjaan berupa PC dan laptop sebanyak 32 unit belum mencukupi kebutuhan administrasi untuk 31 orang PNS dan 20 orang Non ASN Dinas Perumahan dan Permukiman. Sehingga, diupayakan dengan melakukan pengadaan pada tahun anggaran tahun 2024 sebanyak 2 unit PC dan 4 unit laptop. Capain kinerja dinas dapat melebihi target tahunannya yaitu 102,60% dengan penyerapan anggaran 91,99% dan terjadi efisiensi 10,61%. Hal ini menunjukkan bahwa dinas dapat bekerja dengan optimal meskipun masih kekurangan pegawai dan sarpras kantor.

3.3 Analisis Penyebab Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Berdasarkan hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang tahun 2024, mengalami kenaikan saat perubahan anggaran, sehingga terdapat beberapa program/kegiatan yang mengalami penyempurnaan. Berikut ini identifikasi penyebab kenaikan dan penurunan kinerja tahun 2024 yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman:

a. Penyebab peningkatan kinerja pelaksanaan program kegiatan antara lain:

1. Koordinasi yang dilaksanakan kepada SKPD lain/pihak-pihak terkait pada awal tahun;
2. Telah tersusunya Program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung menyentuh ke masyarakat;
3. Memprioritaskan program/kegiatan yang mendukung indikator kinerja dinas;
4. Adanya kegiatan *supporting*/pendukung lain seperti berkadang;
5. Memaksimalkan upaya pembiayaan dari anggran APBN (DAK, BSPS, Reimburse Sanitasi, PAMSISMAS, PESIUW).

b. Penyebab penurunan kinerja pelaksanaan program kegiatan antara lain:

1. Program kegiatan yang dilaksanakan terkendala dengan koordinasi yang berkaitan dengan kewenangan PD lain;

2. Penyederhanaan nomenkatur terkait dengan keterbatasan anggarannya perjalanan dinas dan penunjang lain yang sangat diperlukan untuk koordinasi kegiatan dengan pusat dan propinsi;
3. Terkait urusan yang belum terfokus pada satu PD, misalkan Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Urusan Pekerjaan Umum yang seharusnya sudah berada di PD lain;
4. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tidak bisa dilaksanakan misalnya perubahan nama penerima bantuan yang tidak sesuai *database*.

3.4 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024 dilaksanakan pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota. Tujuan dari PUG pada program ini adalah untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih dan daya dukung air baku bagi perempuan, anak dan kaum rentan. Berikut adalah analisis situasi PUG di Dinas Perumahan dan Permukiman:

Tabel 3.4.1 Analisis Situasi PUG Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024

PROGRAM/SUB KEGIATAN		ANALISIS SITUASI	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	Cakupan layanan air bersih di perdesaan yang belum terlayani 9,53%
		2	Isu kesenjangan gender
		1	Faktor Kesenjangan
		1	Perempuan dalam Pengelolaan dan pengembangan jaringan SPAM masih rendah dan laki laki lebih Dominan
		2	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih di perdesaan utamanya kaum perempuan
		3	Pengambil keputusan pengelolaan SPAM masih didominasi Laki laki
		4	Masih sulitnya mendapat air bersih karena belum terbangunnya Akses perpipaan / SR
		5	Wanita membutuhkan waktu lebih banyak
		6	Masih rendahnya tingkat perekonomian masyarakat
		2	Penyebab Kesenjangan Internal
		1	Rendahnya keterlibatan perempuan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Sarana air bersih
		2	Masih rendahnya keterlibatan wanita pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengadaan sarpras air bersih
		3	Adanya keterbatasan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih
		3	Penyebab Kesenjangan Eksternal
		1	Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih
		2	Masih terbatasnya akses dan sarana serta prasarana air bersih
		3	Masih terbatasnya area pelayanan air bersih di perdesaan

Adanya kesulitan mendapatkan air bersih di pedesaan terutama masyarakat

berpenghasilan rendah menunjukkan bahwa penggunaan air bersih lebih didominasi oleh perempuan dibandingkan laki-laki, mengingat kebutuhan domestik/rumah tangga terhadap air bersih sangat tinggi (memasak, mencuci, mengepel, dll). Belum terbangunnya pipanisasi air bersih di pedesaan, akan menyebabkan kesulitan bagi perempuan untuk mendapatkan air bersih karena harus mengambil air di lokasi sumber air (mata air) dengan jarak cukup jauh dari rumah tinggal. Sehingga, perempuan membutuhkan waktu lebih banyak untuk mengambil air bersih di lokasi sumber air dan menyebabkan ketidakmudahan dan ketidaknyamanan bagi perempuan, serta mengganggu aktivitas rumah tangga.

Total anggaran pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar Rp.9.794.284.224 dengan realisasi Rp.9.765.738.169. Keterkaitan PUG pada target program ini adalah selain meningkatnya cakupan pelayanan air bersih sebesar 3,16% (1.210 RT/KK), juga untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih dan daya dukung air baku bagi kaum rentan, anak-anak dan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan.

Realisasi target Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota adalah 400 RT/KK (1,04%) dengan capaian 303,85%. Sehingga, diharapkan dapat memudahkan kaum rentan, anak dan perempuan dalam beraktivitas sehari-hari tanpa perlu mengambil air dari sumber mata air.

Tindak lanjut hasil capaian kinerja Pengarusutamaan Gender:

Akan diupayakan untuk semua kegiatan teknis Dinas Perumahan dan Permukiman harus mengacu dan berdampak pada Pengarusutamaan Gender baik perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatannya.

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang dalam menyusun laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja sesuai sasaran strategis organisasi, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta analisis capaian kinerjanya.

Capaian kinerja tahun 2024 tersebut rata-rata mencapai 102,60% Komitmen internal dan dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang menjadi lebih baik.

4.1 Permasalahan

Berikut adalah hambatan yang terjadi pada Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2024, yaitu:

1. Jumlah pegawai yang kurang memenuhi sesuai kebutuhan operasional dinas masih kurang dengan cakupan kinerja se-Kabupaten Jombang;
2. Masih tingginya rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah 5.406 RT/KK (1,35%);
3. Masih tingginya rumah tangga dengan sanitasi belum layak di Kabupaten Jombang sebanyak 53.437 RT/KK (13,30%) membutuhkan strategi penanganan yang mengedepankan skala prioritas karena merupakan kebutuhan dasar, sedangkan kemampuan cakupan penanganan sangat terbatas;
4. Daerah rawan air bersih yang telah ditetapkan yaitu 8 kecamatan, 5 di utara Brantas dan 3 di luar utara Brantas yang membutuhkan penanganan yang berbeda satu sama lain misalkan di utara Brantas kondisi sumber air yang sangat terbatas untuk eksplorasi membutuhkan tenaga ahli geolistik khusus untuk menentukan, serta banyaknya infrastruktur yang cenderung menutup resapan air seperti banyaknya bangunan dan jalan tidak menyediakan lahan resapan;
5. Semakin tinggi debit air yang masuk di drainase perkotaan karena semakin berkurangnya lahan resapan perkotaan;
6. Masih tingginya areal kawasan kumuh sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor:188.4.45/ 318 /415.10.1.3/2020 tanggal 7 September 2020 dengan luas 474.71 Ha, 9 kecamatan dan 37 desa.

4.2 Rekomendasi

Dari beberapa masalah yang dijabarkan pada sub bab 4.1, kami menyarankan solusi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi pegawai agar dapat melaksanakan tupoksi dengan maksimal;
2. Diupayakan penyediaan RTLH untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan pembiayaan APBN jika APBD kurang mendukung dengan skala prioritas;
3. Laksanakan pendataan dan inventarisasi kondisi PSU sehingga bisa diprioritaskan perumahan yang memang membutuhkan pemeliharaan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengurangi kesenjangan penyediaan sanitasi.

Jombang, 31 Desember 2024



KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG

AGUNG HARIADI, ST., MM.

Pembina

NIP.19701126 200212 1 006